

# BAB I

## PENDAHULUAN

Indo-Pasifik merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada kawasan yang saling berhubungan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kawasan ini menjadi objek kajian yang cukup menarik berkaitan dengan peralihan energi terbarukan karena melibatkan 60% dari total populasi dunia (Haruko, 2020). Hal ini dikarenakan Indo-Pasifik menjadi tempat bagi negara-negara yang paling padat penduduknya dan dinamis secara ekonomi di dunia, termasuk Indonesia, China, dan India. Konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik ini menyebabkan kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat geopolitik yang krusial.

### A. Latar Belakang Masalah

Indo-Pasifik sangat prospektif dikarenakan di dalamnya terdapat jalur perdagangan penting seperti Selat Malaka yang menjadi rute bagi sebagian aliran perdagangan dunia. Tak hanya itu, banyak pelabuhan tersibuk dan penting di dunia yang berlokasi di kawasan ini dan menjadi jembatan bagi perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan jumlah populasi tersebut dan aktivitas ekonomi yang tinggi, kawasan Indo-Pasifik juga menyumbang 40% dari produk domestik bruto (PDB) global (World Bank, 2021).

Namun faktanya, kawasan ini masih bergantung terhadap suplai energi tidak terbarukan. Istilah "terbarukan" yang umumnya diasosiasikan pada sumber daya



*Gambar 1 Peta kawasan Indo-Pasifik*  
*Sumber : SciencesPo Centre for International Studies*

energi dan teknologi yang memiliki ciri umum bahwa mereka tidak dapat habis atau secara alami dapat diperbaharui. Sumber daya terbarukan meliputi energi matahari, angin, air terjun, panas bumi (geothermal), bahan tumbuhan (biomassa), gelombang, arus laut, perbedaan suhu di lautan, dan energi pasang surut (Armstrong & Hamrin).

Tercatat bahwa konsumsi energi di kawasan ini hingga seperempat dari energi dunia dan diprediksi akan meningkat hingga setengahnya pada tahun 2050 (Bowen, 2022). Namun, semakin meningkatnya kebutuhan energi di kawasan ini, bersamaan dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi yang pesat, dapat mengakibatkan peningkatan permintaan energi yang sulit dipenuhi hanya dengan sumber energi tidak terbarukan.

Tak hanya itu, energi tidak terbarukan juga kerap kali mengalami distrupsi akibat konflik geopolitik, bencana alam, fluktuasi harga, dan sebagainya. Sehingga, gangguan ini tentu akan mengancam perputaran aktivitas ekonomi yang bergantung pada sumber energi ini.

Perlu adanya diversifikasi dan alih transisi energi bertahap menuju energi terbarukan di kawasan Indo-Pasifik. Saat ini, transisi energi di kawasan, masih dipimpin oleh Tiongkok yang mendominasi rantai pasokan energi terbarukan (Bowen, 2022). Di sisi lain, Australia berpeluang mengambil kepemimpinan dalam sektor energi terbarukan tersebut dengan beberapa potensi. Pada tahun 2021, energi terbarukan di negara ini bahkan menyumbang sebanyak 29% dari total produksi listrik secara nasional, yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah. Sumber utama dari produksi listrik ini berasal dari tenaga surya, angin, dan air (Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, 2021). Hal ini menunjukkan kemampuan Australia dalam alih transisi energi nasional menuju tingkatan yang lebih luas di kawasan.

Kemampuan Australia dalam hal kepemimpinan dalam sektor energi juga didukung dengan kesuksesan diplomasi energi yang telah dilakukan. Sebelumnya, pada tahun 1970-an hingga 1980-an, diplomasi energi masih ditujukan pada pembangunan jaringan perlindungan nuklir sebagai syarat sebelum ekspor uranium. Kemudian perkembangan diplomasi energi semakin pesat akibat pertumbuhan

industri yang akhirnya pada beberapa dekade terakhir diplomasi energi ditujukan untuk mengamankan pasar ekspor Australia (Clarke, 2008) .

Dalam sektor energi terbarukan, diplomasi energi yang pernah dilakukan Australia terlihat pada saat menjadi tuan rumah KTT G20. Australia berhasil memimpin upaya untuk memasukkan reformasi energi dalam agenda global. Australia mengambil peran sebagai kekuatan menengah yang berperan sebagai perantara dalam mencapai konsensus dengan fokus pada penguatan lembaga multilateral yang sudah ada, meningkatkan koordinasi di antara organisasi-organisasi energi internasional, dan mempromosikan kerja sama di antara anggota G20 untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, dengan tujuan memajukan sistem energi global yang lebih inklusif, koheren, dan berkelanjutan (Downie, 2018).

Sebelumnya, Australia juga berperan sebagai pemasok utama batu bara dan gas untuk kebutuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Bahkan penerimaan ekspor tahunan dari sumber daya energi ini yang diperkirakan mencapai \$114 miliar pada akhir dekade ini (Australian Government, 2015) yang menyebabkan Australia mengklaim negara mereka sebagai '*superpower energy*'.

Melalui adanya alih energi ini, maka akan terjadi perubahan fundamental dalam ekonomi prospek ekonomi Australia di masa depan. Tidak hanya itu, negara-negara penerima ekspor komoditas ini seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang memegang total dua per tiga dari impor batu bara dan gas Australia telah menetapkan batasan untuk konsumsi energi kotor (Bowen, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen negara-negara di kawasan untuk perlahan mengalihkan sumber energi menuju opsi sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan.

Melihat tingginya potensi Australia dalam alih transisi energi di kawasan ini sekaligus pembatasan terhadap konsumsi energi kotor oleh negara-negara di kawasan, maka penulis akan menggali lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan energi terbarukan sebagai media diplomasi Australia di kawasan Indo-Pasifik tahun 2017-2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, muncul rumusan masalah **“Bagaimana efektivitas diplomasi energi terbarukan Australia di kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2017-2022?”**

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam memahami masalah serta menjawab pertanyaan penelitian yang berkisar pada penggunaan energi terbarukan sebagai media diplomasi Australia di kawasan Indo-Pasifik antara tahun 2017 hingga 2022, penulis mengambil dua kerangka konseptual sebagai fondasi utama bagi penelitian ini.

Kerangka konseptual yang diadopsi dalam penelitian ini mencakup dua konsep utama yang saling terkait, yaitu *soft diplomacy* dan diplomasi energi (*energy diplomacy*). Kombinasi kedua kerangka teori ini akan memberikan pandangan yang komprehensif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial seputar upaya Australia dalam memanfaatkan sumber daya energi terbarukan sebagai media diplomasi di kawasan Indo-Pasifik.

#### **1. Soft Power**

Konsep *power* telah menjadi bagian dari studi hubungan internasional sejak awal melalui tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh Thucydides (1954) dan Machiavelli (1935). Dalam definisi sederhana, *power* dijelaskan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Joseph S. Nye). Penggunaan konsep *power* seringkali dihubungkan dengan kekuatan militer atau ekonomi suatu negara. Namun, semakin berkembangnya studi ini, konsep *power* mengalami dikotomi makna yakni *hard power* dan *soft power*.

Josep S. Nye, Jr, sebagai tokoh yang menggali lebih dalam konsep *soft power* berpendapat melalui bukunya *Soft Power : The Means to Success in World Politics* (2004) bahwa *soft power* sebagai

*“The ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country's culture, political*

*ideals, and policies. When our policies are seen as legitimate in the eyes of others, our soft power is enhanced (Joseph S. Nye)."*

*Soft power* didefinisikan sebagai upaya mendapatkan apa yang diinginkan dengan daya tarik tanpa paksaan dan hukuman. Konsep ini menekankan pada *co-optive power* daripada *command power*, yang mencakup kemampuan membentuk keinginan orang lain, bisa bergantung pada daya tarik budaya serta nilai-nilai, atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan agenda politik dengan cara yang membuat orang lain sulit untuk mengekspresikan preferensi mereka. Singkatnya, *soft power* berarti *attractive power* (Joseph S. Nye).

Dalam spektrum *soft power*, terdapat tiga level dalam mencapai tujuan yang diinginkan yakni *agenda setting*, *attraction*, dan *co-optive behaviour*. Dalam memastikan agenda tercapai menggunakan konsep ini, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan. Nye menyatakan bahwa daya tarik (*attractiveness*) *soft power* suatu negara berasal dari tiga sumber utama: budaya (*culture*), nilai-nilai politik (*political values*), dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*). Budaya (*culture*) mencakup *high culture* seperti sastra, seni, dan pendidikan dan *popular culture* yang sebagian besar terkait dengan mass entertainment. Nilai-nilai politik (*political values*) menunjukkan aspek-nilai domestik dan kebijakan negara atau ideologinya. Sumber ketiga dari *soft power* adalah kebijakan luar negeri (*foreign policies*) suatu negara, yang bisa menciptakan daya tarik jika dianggap sah oleh negara lain (Joseph S. Nye).

Tak hanya itu, Todd Hall menambahkan sumber daya lainnya yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) yakni *institutions*, *reputations*, dan *representation*. *Institutions*, terlebih pada lembaga internasional dapat menjadi sumber daya tarik suatu negara apabila negara tersebut menjadi anggota dan memiliki peran yang relevan di dalamnya. Sumber daya tarik berikutnya yakni *reputations* yakni kredibilitas yang diperoleh suatu negara di kancah internasional karena prestasinya, misal dalam bidang ekonomi atau budaya.

Terakhir, Hall menekankan pentingnya *representational power* yang merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengonstruksi penafsiran isu-isu, mengatur interpretasi, dan secara sengaja berusaha membentuk keyakinan orang lain. Contohnya adalah melalui diplomasi publik atau kontrol informasi (Hall, 2010).

Dalam membentuk keyakinan tersebut terdapat dua cara *framing* yang dapat mempengaruhi hasil dalam hubungan internasional yakni *normative framing* and *analytical framing*. *Normative framing* merujuk pada pengidentifikasian masalah pada level moral atau emosional, mengisyaratkan bahwa memperhatikan masalah tersebut adalah tindakan yang tepat. Sementara pada *analytical framing* melibatkan penjelasan mengapa sesuatu terjadi dengan menceritakan alasan di baliknya. Melalui framing ini, akan muncul diskusi dari aktor yang terlibat sebagai pelaku atau korban. Negara yang menjadi korban mungkin menyalahkan orang lain, sementara yang dituduh bisa mencoba mengalihkan. Melalui *framing* ini, negara akan terpengaruh dengan cara mereka membuat pilihan-pilihan di dunia internasional.

## **2. Diplomasi Energi (*Energy Diplomacy*)**

Jurnal dengan judul *Negotiating Energy Diplomacy and Its Relation with Foreign Policy and National Security* membahas mengenai pentingnya energi dalam arah kebijakan negara dan bagaimana hubungannya dengan keamanan nasional. Keamanan nasional menjadi penting karena berhubungan dengan prinsip tindakan yang diambil oleh suatu negara berdasarkan geografis, ancaman eksternal, dan tantangan dari luar lainnya termasuk energi. Implementasi strategi keamanan nasional melibatkan faktor eksternal dan isu-isu internasional dilakukan melalui instrumen kebijakan luar negeri yaitu hubungan internasional dan diplomasi. Dalam pembahasan diplomasi energi, maka pembahasan dipersempit menjadi hubungan eksternal pada sektor energi.

Adanya istilah diplomasi energi hadir setelah adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan energi global akibat industrialisasi. Diplomasi

energi mengacu pada kegiatan diplomasi yang dirancang untuk meningkatkan akses ke sumber daya energi dan pasar (Giuli, 2015). Ini adalah sistem yang memengaruhi kebijakan, resolusi, dan perilaku pemerintah asing serta faktor-faktor internasional lainnya melalui dialog diplomatik, negosiasi, lobi, advokasi, dan metode damai lainnya.

Energi memiliki kekuatan dalam mengatur agenda negara terlebih jika memiliki akses dalam rantai produksi hingga distribusinya. Selain itu, hubungan energi dan ekonomi yang saling berkesinambungan juga menguatkan alasan mengapa energi penting dalam hubungan internasional. Tujuan akhir adanya diplomasi jenis ini antara lain adalah terwujudnya ketahanan energi (*energy security*) yang ditandai dengan *availability*, *reliability* dan *affordability* (Pascual & Elkind, 2010).

#### **D. Hipotesis**

Dalam kawasan Indo-Pasifik yang strategis, Australia memiliki potensi besar untuk menggunakan energi terbarukan sebagai media diplomasi yang dapat memengaruhi peralihan energi regional. Dengan demikian, hipotesis ini mengasumsikan bahwa strategi diplomasi energi terbarukan yang dilakukan Australia efektif dilakukan di Indo-Pasifik dengan alasan rasionalitas politik negara-negara di kawasan tersebut yang diuntungkan.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merinci upaya diplomasi energi yang dilakukan oleh Australia dalam kurun waktu 2017-2022 di kawasan Indo-Pasifik. Fokusnya mencakup analisis strategi, kebijakan, dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia untuk memperluas aksesnya ke sumber daya energi dan pasar energi di wilayah tersebut. Penelitian juga mengeksplorasi interaksi antara diplomasi energi dan kebijakan luar negeri Australia serta cara upaya ini mempengaruhi keamanan ekonomi dan energi di Indo-Pasifik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Australia dalam mempertahankan stabilitas dan ketahanan energi di kawasan ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merujuk pada panduan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Ini juga bisa dianggap sebagai serangkaian peraturan, tindakan, dan prosedur yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menghimpun data faktual secara mendetail dan menyajikannya dalam suatu gambaran yang komprehensif. Tujuan utama penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti, khususnya terkait dengan diplomasi energi Australia (Jatmika, 2016).

Sumber utama yang diacu dalam penulisan paper ini adalah *Foreign Policy White Paper 2017*, bersamaan dengan laporan resmi dari instansi pemerintah dan organisasi internasional yang dapat diakses secara digital. Sumber-sumber sekunder diperoleh melalui literatur akademik seperti buku, jurnal, surat kabar, dan sumber digital yang tersedia secara luas.

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Australia dalam upaya diplomasi energi bersih dan terbarukan di Indo-Pasifik selama periode 2017-2022.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, lingkup penelitian, metode penelitian, dan tujuan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini.

### **Bab II: Penggunaan Energi Terbarukan di Indo-Pasifik**



Bab ini akan membahas mengenai ketergantungan Indo-Pasifik dengan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya namun diimbangi dengan pengelolaan isu energi terbarukan yang dilakukan oleh Australia sehingga negara-negara di Indo-Pasifik terbuka terhadap solusi yang ditawarkan Australia.

### **Bab III: Potensi Energi Terbarukan Australia**

Dalam bab ini akan dibahas penjelasan tentang potensi pengembangan, keberlanjutan, dan kontribusi energi terbarukan dalam konteks upaya diplomasi Australia di Kawasan Indo-Pasifik.

### **Bab IV: Diplomasi Energi Terbarukan Australia di Kawasan Indo-Pasifik**

Dalam bab ini akan membahas pemanfaatan energi terbarukan sebagai media diplomasi Australia di Indo-Pasifik serta dampaknya efektivitas dari strategi tersebut.

### **Bab V: Penutup**

Pada Bab IV akan berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai penggunaan energi terbarukan sebagai media diplomasi Australia di kawasan Indo-Pasifik tahun 2017-2022.